



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : H. LALU ALFIAN RAHMAN, ST
2. Jabatan : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
3. NHK : 409864

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.970.000.000

1. Tanah Seluas 6.394 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 955.000.000
2. Tanah Seluas 6.920 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000
3. Tanah Seluas 1.400 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
4. Tanah Seluas 20.000.000 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1.450 m2/24 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
6. Tanah Seluas 1.689 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 608 m2/42 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 145.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 65.678.579



F. HARTA LAINNYA	Rp.	25.000.000
Sub Total	Rp.	4.405.678.579
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.405.678.579

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.